

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

(L K P J)

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rencana Strategis BPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 mengacu pada Visi 1 (Pertama) Kepala Daerah tahun 2016 – 2021 yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Madiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai Tujuan Strategis : **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang taat Azas** dengan Sasaran Strategis :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkula dengan Indikator Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu dan Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel
2. Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas dengan Indikator Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD dengan indikator Hasil Penilaian AKIP BPKD

Untuk mewujudkan Capaian Sasaran Strategis diatas maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung oleh 5 Program dan 36 Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat BPKD	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	Jumlah Tersusunnya APBD dibagi Tepat Waktu Penetapan APBD dikali seratus persen	Persen	100	100	Tersusunnya APBD sesuai Jadwal yang telah di Tetapkan
2.	Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibagi Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dikali seratus persen	Persen	100	100	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah (LKD) secara Tepat Waktu serta sesuai ketentuan untuk memperoleh OPINI WTP
3.	Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak dibagi Total BMD se Kab. Pesisir Selatan dikali 100 persen	Persen	100	100	Terpenuhinya Pengelolaan BMD yang Tertib dan tatat Azas sehingga diperoleh Laporan BMD untuk pelaksanaan Tupoksi dengan kondisi baik , Ekonomis
4.	Hasil Penilaian SAKIP BPKD	Nilai SAKIP	A	A	A	Tersusunnya Laporan SAKIP Lingkup BPKD Tepat Waktu dan Sesuai Aturan .

4.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas/Badan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019;	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Dokumen APBD dan P-APBD tepat waktu 2. Persentase perangkat daerah yang tertib penatausahaan barang miik daerah 3. Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP	Persen	100	100	808.233.271	783.456.593	Tidak ada permasalahan		

[illegible]

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tanggal 27 November Tahun 2020										
1				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Tersusunnya buku Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten	buku	75	75	146.196.157	144.790.850	1. Perubahan regulasi yang sering dalam waktunya berdekatan	1. Melakukan Koordinasi bersama TAPD dan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Pesisir Selatan						2. Aplikasi yang digunakan baru dan kurangnya Sosialisasi terhadap Pemda Kabupaten	Provinsi 2. Mempela jari secara otodidak dan bertahap	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
2				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan	Buku	75	75	151.355.326	148.535.563	1. Perubahan regulasi yang sering dalam waktunya berdekatan	1. Melalui Koordinasi bersama TAPD dan Provinsi	
											2. Aplikasi yang digunakan baru dan kurangnya Sosialisasi terhadap Penda Kabupaten	2. Melakukan lajari secara otodidak dan bertahap	
3				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	buku	50	50	104.714.378	101.528.350	Tidak ada permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Kab.Pesisir Selatan TA.2020								
4				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA.2020	buku	50	50	216.784.295	216.182.200	Tidak ada permasalahan		
5				Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Pesisir Selatan TA.202	buku	50	50	95.705.062	89.705.200	Tidak ada permasalahan		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
6				Penyusunan DPA Perubahan	Tersusunnya DPA Perubahan OPD	buku	540	540	51.758.337	43.034.880	Tidak ada permasalahan		
7				Pedoman Penyusunan RKA	Tersusunnya buku standar biaya (pedoman penyusunan RKA) dan terselenggara nya sosialisasi pedoman penyusunan RKA	buku	540	540	41.719.716	39.679.550	1. Tidak terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA karna adanya Sosial Distancing	1. Membu at surat edaran	
2				Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perangkat daerah yang menyampaik an laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	86.727.436	84.372.300	Tidak ada permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai SAP	Laporan	7	7	86.727.436	84.372.300	1.Keterlambatan OPD menyampaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1. PPKD akan memberikan sanksi keras kepada OPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan OPD 2. Melakukakan Bimtek Pengelolaan dan Penyusunan Laporan	
											2. Pengelola Keuangan pada OPD belum memahami cara menggunakan aplikasi		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
											SIPKD untuk menyusun Laporan Keuangan (neraca, LO, LPE)	Keuangan	
3				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Pencapaian WTP	Persen	100	100	57.163.487	54.953.300	Tidak ada permasalahan		
1				Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kasus Ganti Rugi sesuai LHP BPK	Persen	100	100	57.163.487	54.953.300	1. Pihak yang harus menyelesaikan tuntutan ganti rugi belum menyelesaikan temuannya	1. TPKN D akan lebih maksimal untuk menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Dokumen APBD dan P-APBD tepat waktu 2. Persentase perangkat daerah yang tertib penatausahaan barang milik daerah 3. Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP	Persen	100	100	1.495.724.256	1.412.167.940	Tidak ada permasalahan		
1				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	81.457.678	78.329.600	Tidak ada permasalahan	-	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
2				Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	PPK SKPD mampu menyusun laporan keuangan SKPD sesuai	OPD	45	45	199.544.733	176.928.950	1. Keterlambatan OPD menyampaikan Dokumen Laporan Keuangan untuk Rekonsiliasi Keuangan	1. PPKD akan lebih tegas memberikan sanksi kepada OPD yang terlambat menyampaikan Laporan	
											2. Pandemi covid19 menyebabkan Rekonsiliasi Keuangan harus dilakukan secara online	2. Mengoptimalkan Rekonsiliasi Keuangan secara online	
3				Penunjang Bendahara Umum Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi keuangan Daerah	Bulan	12	12	795.284.342	751.823.586	Tidak ada permasalahan		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
4				Pengelolaan Dana Transfer	Terlaksananya Pengelolaan Dana Transfer sesuai Peraturan	bulan	12	12	15.003.992	13.641.027	Tidak ada permasalahan		
5				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	105.003.992	103.686.100	Tidak ada permasalahan		
6				Pengelolaan dan Penatausaha an Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Bulan	12	12	43.419.399	42.032.477	Tidak ada permasalahan		
7				Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi SIPKD	Bulan	12	12	165.538.920	158.746.700	Tidak ada permasalahan		
8				Tata Kelola	Terlaksananya Pengelolaan	Persen	100	100	90.000.000	86.979.500	Tidak ada		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Program Hibah Jalan Daerah	program Hibah Jalan Daerah						permasalahan		
4				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persen	100	100	536.717.900	536.717.900	Tidak ada permasalahan		
1				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Unit	4	4	536.717.900	536.717.900	Tidak ada permasalahan		
				Program Peningkatan dan Pengembangan an Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Dokumen APBD dan P-APBD tepat waktu 2. Persentase perangkat daerah yang tertib penatausahaan barang	Persen	100	100	398.140.012	386.673.461	Tidak ada permasalahan		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					miik daerah 3. Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP								
1				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Tersusunnya Laporan BMD	Buku	1058	1058	133.262.609	128.750.285	1. Pelaksanaan Rekonsiliasi PD dating tidak sesuai jadwal yang di tetapkan	1. Memberi Sanksi/ Konsekuensi bagi OPD yang tidak melaksanakan akan Rekon sesuai jadwal yag di tetapkan 2. Tidak terlaksana any a cetak	
											2. Cetak buku tidak sesuai perencanaan karena		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
											Rekofusing	buku	
2				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Buku	90	90	22.217.190	20.633.113	1. Usulan dari OPD banyak tidak lengkap dan tidak berdasarkan KIB	1. Agar dapat diperbaiki untuk di cek dengan KIB OPD yang bersangkutan	
3				Penghapusan Barang-barang Inventaris	Jumlah Tersusunnya Laporan Penghapusan Barang-barang inventaris	SKPD	45	45	31.872.500	28.776.750	1. Data di KIB tidak akurat	1. OPD yang bersangkutan dapat menvalidkan data KIB nya	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
											2. Usulan BMD yang dihapus, yang berada di OPD bersangkutan banyak yang tidak ditemukan fisiknya	2. OPD yang bersangkutan diminta untuk menyelesaikan kembali keberadaan barang nya	
4				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya data Barang Milik Daerah yang benar sdan akurat	SKPD	45	45	210.787.713	208.513.313	1. Pelaksanaan Inventarisasi direncanakan bulan maret, terkendala karna kondisi pandemic sehingga Pengecekan BMD ke lapnagan tidak terlaksana dengan optimal	1. Pendistribusian kerja ke OPD Terkait untuk lebih di maksimal kan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
5				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	792.361.344	760.719.027	Tidak ada Permasalahan		
1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Tagihan Rekening Listrik, Air dan Telp	Bulan	12	12	89.400.000	81.355.246	Tidak ada Permasalahan		
2				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Honorarium PNS dan NON PNS	Bulan	12	12	187.990.065	174.820.000	Tidak ada Permasalahan		
3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	183.650.000	180.696.000	Tidak ada Permasalahan		
4				Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	26.303.527	26.002.602	Tidak ada Permasalahan		
5				Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya Barang Cetakan dan	Bulan	12	12	16.527.100	15.985.200	Tidak ada Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penggandaan	Penggandaan								
6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Bulan	12	12	10.780.000	10.779.672	Tidak ada Permasalahan		
7				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	8.500.000	7.950.000	Tidak ada Permasalahan		
8				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat Tamu dan Pegawai	Bulan	12	12	47.850.000	47.832.950	Tidak ada Permasalahan		
9				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12	12	176.235.695	171.958.694	Tidak ada Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
10				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Bulan	12	12	18.100.000	17.072.000	Tidak ada Permasalahan		
11				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Perencanaan dan Peanggaran Lingkup BPKD	Bulan	12	12	27.024.957	26.266.663	Tidak ada Permasalahan		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	493.384.000	483.331.046	Tidak ada Permasalahan		
1				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tepeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	12	276.920.000	271.342.890	Tidak ada Permasalahan		
2				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Persentase Terpeliharaan Kendaraan Dinas/	Bulan	12	12	207.189.000	202.827.156	Tidak ada Permasalahan		

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Dinas/Operasi sional	Operasional								
3				Pemeliharaan n Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	9.275.000	9.161.000	Tidak ada Permasalahan		

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMATERA JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2019

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pada beberapa OPD Terdapat proses pembayaran pekerjaan yang tertunda akibat dari kesalahan pihak penyedia, sehingga terjadi pembayaran denda dan realisasi keuangan yang diundur dan diluncurkan pada tahun berikutnya. Untuk hal ini kami berharap agar Pemerintah lebih jelimet dalam memilih dan menentukan penyedia jasa agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari	Penentuan Penyedia Jasa merupakan wewenang dari SKPD dan melalui mekanisme ULP	